



Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Nur Azizah, Junaidi, dan Achdiar Redy Setiawan

Universitas Trunojoyo Madura

nuraziah107@gmail.com

doi: 10.18382/jraam.v1i2.18

Informasi Artikel

Tanggal masuk	23-06-2015
Tanggal revisi	28-08-2015
Tanggal diterima	26-09-2015

Keywords:

Financial Statement Presentation
Accessibility
Government Internal Control System
Transparency
Accountability

Abstract

The aims of this study are to test the effect of financial statement presentation, accessibility of financial statements, and government internal control system to the transparency and accountability in local government financial management. The population of the research is local government work unit in Lamongan Regency collected through survey questionnaires. The samples of this research are 128 respondents which chosen based on purposive sampling criteria. Analysis methods applied in hypothesis testing is multiple regression analysis by using f-test and t-test. The results show that the financial statement presentation and government internal control system do not affect the transparency. Further, accessibility financial statement affects the transparency and financial statement presentation; however, accessibility financial statement does not affect the accountability in local financial management. Moreover, government internal control system affects the accountability in financial management.

Kata kunci:

Penyajian Laporan Keuangan
Aksesibilitas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Transparansi
Akuntabilitas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lamongan dengan metode pengumpulan data *survey* melalui penyebaran kuesioner. Jumlah sampel adalah 128 responden yang diambil berdasarkan *purposive sampling*. Metode analisis data adalah regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap transparansi. Selanjutnya, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan penyajian laporan keuangan; namun aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *good governance* dimana dalam sistem ini ne-

gara Indonesia mengacu pada pertumbuhan pembangunan, ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara. Penyelenggaraan nega-

ra tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa.

Menurut Mahsun, *et. al.*, (2006: 123) laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Pemerintah melakukan pertanggungjawaban atas laporan keuangan karena pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar dalam mengelola keuangan demi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, laporan keuangan digunakan oleh pemerintah untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan jasa pada publik.

Pemerintah kurang transparan kepada masyarakat karena laporan keuangan hanya dipublikasikan dalam lingkungan pemerintah saja, padahal masyarakat berperan penting terhadap keterbukaan laporan kinerja pemerintah. Otonomi daerah masih dipahami secara sempit sehingga hanya pemerintah daerah yang aktif, sedangkan peran serta masyarakat luas belum ada. Pemerintah daerah harus memiliki akses yang memadai, guna mewujudkan prinsip transparansi agar memudahkan para *stakeholder* untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat terwujud jika entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara sistem pengendalian yang memadai (Aidil, 2010).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Mulyana (2006), Mustofa (2012), Sande (2013), Aliyah dan Nahar (2012), Zalni (2013) dan Sari (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel dependen dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel dependen yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyana (2006) menunjukkan penyajian neraca dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transpa-

ransi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mustofa (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sande (2013) membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aliyah dan Nahar (2012) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Zalni (2013) membuktikan bahwa komitmen karyawan dan penerapan SPIP secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara pengendalian intern dengan perwujudan transparansi laporan keuangan dengan tingkat yang kuat. Dapat disimpulkan semakin tinggi penerapan pengendalian intern, maka laporan keuangan semakin transparan, dan sebaliknya jika pengendalian intern tidak diterapkan maka laporan keuangan semakin tidak transparan.

Mardiasmo (2002: 159) menyatakan bahwa adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Hal ini menandakan bahwa informasi yang dibutuhkan publik adalah informasi mengenai laporan keuangan pemerintah yang disajikan secara handal, relevan, dapat dibandingkan guna untuk pengambilan keputusan.

Namun upaya menyajikan laporan keuangan serta pengelolaan keuangan daerah nampaknya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah serta di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari opini BPK terhadap kinerja pemerintah daerah khususnya di kabupaten Lamongan, dimana laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Banyaknya tindak kecurangan serta praktik korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah yang tidak diketahui oleh publik, menuntut adanya peningkatan pengawasan dan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah agar dilakukan secara menyeluruh dan secara integral.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas

laporan keuangan, dan SPIP terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Kajian Teori

2.1 Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, SPIP, Transparansi, dan Akuntabilitas

Bastian (2010: 297) menyatakan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 103 menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, televisi, dan cara lainya sesuai dengan media informasi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten setempat.

Menurut Hartadi (1999: 3) sistem pengendalian internal dapat dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat alat fisik, dokumentasi orang orang dengan berinteraksi satu sama lain diarahkan untuk: (a) melindungi harta, (b) menjamin terhadap terjadinya utang yang tidak layak, (c) menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, (d) dapat diperolehnya operasi secara efisien, (e) menjamin ditaatinya kebijakan suatu entitas. SPIP sebagai instrumen yang berfungsi sebagai alat pengendalian anggaran pemerintah agar tidak terjadi pemborosan-pemborosan pengeluaran.

Menurut Nordiawan (2006: 131) transparansi adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya kekayaan daerah serta keseluruhan kegiatan pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Output dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) daerah yang merupakan hasil laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja pada suatu pemerintah daerah dalam waktu satu periode.

2.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diuji pada penelitian ini ada 6 hipotesis. Berikut adalah penjelasan masing-masing.

1. Penyajian Laporan Keuangan dan Transparansi

Mahsun, *et. al.*, (2006) menyampaikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pemakai. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing masing kelompok pemakai. Pemerintah daerah dituntut lebih transparan seiring perkembangan sektor publik di Indonesia. Salah satu pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap publik yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang disajikan secara transparan melalui media massa maupun media nirmassa. Hasil penelitian Aliyah dan Nahar (2012) menunjukkan, penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya, dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis adalah:

H₁: Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi.

2. Penyajian Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah mengatur kehidupan bernegara yang semakin terbuka. Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian Aliyah dan Nahar (2012) yang menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti dan diterima. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi, sehingga rumusan hipotesis adalah:

H₂: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi.

3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Transparansi

Tuntutan akan perwujudan *good governance* di Indonesia yang semakin meningkat berdampak pada sistem pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan. Hal ini tidak terpisahkan oleh adanya sistem pengendalian dan pengawasan di setiap instansi pemerintah yang secara sistematis. Sistem pengendalian dan pengawasan tersebut terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban secara efektif, efisien, dan terkendali. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012), yang meneliti tentang pengaruh SPIP terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, terdapat hubungan yang signifikan antara pengendalian internal dengan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah hubungan positif. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis adalah:

H₃: SPIP berpengaruh terhadap transparansi

4. Penyajian Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik. Manajemen sektor publik diharapkan memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Sande (2008) menyatakan bahwa laporan keu-

angan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis adalah:

H₄: Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5. Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Bentuk pertanggungjawaban publik secara terbuka dan jujur adalah berupa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang didukung dengan aksesibilitas. Laporan keuangan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012). Sebagaimana dalam penelitian Mustofa (2012) tentang pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis adalah:

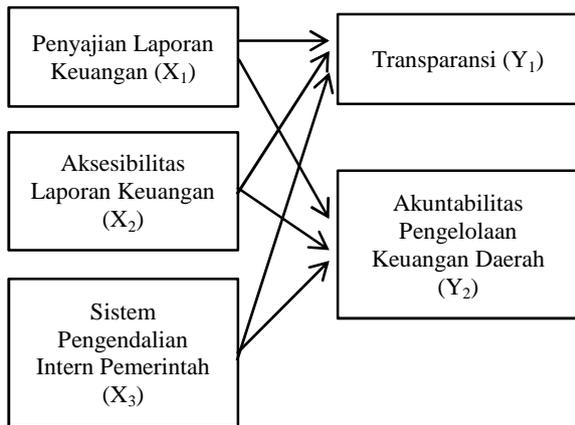
H₅: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

6. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

SPIP memiliki tujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Zalni (2013) yang mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka rumusan hipotesis adalah:

H₆: SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hipotesis penelitian ini terdiri dari 6 hipotesis. Jika digambarkan dalam model rerangka penelitian adalah pada gambar 1 berikut:



Gambar 1: Rerangka Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *survey* dengan menyebarkan kuisisioner pada responden.

Populasi penelitian ini adalah seluruh SKPD di lingkungan kabupaten Lamongan. Sampel dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: a) pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, b) orang yang berfungsi sebagai pengelola keuangan di SKPD, c) pegawai yang berfungsi sebagai pengelola keuangan di SKPD yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun. Kriteria sampel tersebut didasarkan pada fungsi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: a) kepala SKPD, b) PPK-SKPD, c) bendahara pengeluaran, dan d) staf akuntansi.

Peneliti menyebarkan kuisisioner di 32 SKPD kabupaten Lamongan, masing-masing 4 kuisisioner, sehingga total kuisisioner yang disebarkan sebanyak 128 kuisisioner. Kuisisioner diisi oleh berbagai fungsi di SKPD, yaitu kepala SKPD, PPK-SKPD, bendahara pengeluaran, dan staf akuntansi. Tabel 1 berikut adalah rangkuman hasil distribusi kuisisioner.

Tabel 1. Distribusi dan Pengambilan Kuisisioner

Kuisisioner	Jumlah	Persentase
Disebarkan	128	100%
Kembali	104	81,25%
Tidak kembali	24	18,75%
Tidak dapat diolah	6	4,68%
Diolah	98	76,56%

3.2 Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan 3 variabel independen dan 2 variabel dependen. Variabel independen terdiri penyajian laporan keuangan (X₁), aksesibilitas laporan keuangan (X₂), dan SPIP (X₃). Sedangkan variabel dependen terdiri dari transparansi (Y₁) dan pengelolaan keuangan daerah (Y₂).

3.3 Alat Analisis Data

3.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kuisisioner dilakukan untuk menjamin bahwa instrumen adalah akurat, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan sebagai alat pengumpulan data. Kedua pengujian ini menggunakan bantuan program *SPSS for window release 16.00*. Kriteria yang ditetapkan untuk mengukur valid tidaknya suatu data adalah jika r_{hitung} (koefisien korelasi) lebih besar dari r_{tabel} (nilai kritis) pada taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka dapat dikatakan valid. Untuk mengukur reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2013: 47).

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh diuji dahulu untuk memenuhi asumsi dasar, yaitu dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.3.3 Model Regresi

Metode regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y_2 = b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y₁ : Transparansi

Y₂ : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

X₁ : Penyajian Laporan keuangan

X₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan

X₃ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

: Konstanta

b₁ : koefisien regresi dari X₁

b₂ : koefisien regresi dari X₂

b₃ : koefisien regresi dari X₃

e : Error

3.3.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai statistik F dan nilai statistik t.

1. Uji statistik F menunjukkan bahwa semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian melalui uji F atau variansinya adalah dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , pada $(\alpha) = 0,05$.
 - a) H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$
 - b) H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$
2. Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} masing-masing variabel bebas dengan t_{tabel} , menggunakan derajat kesalahan 5%. Adapun kriteria pengambilan keputusan, yaitu:
 - a) $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - b) $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4. Hasil Penelitian

4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini valid karena r_{hitung} dari variabel-variabel penelitian lebih besar dari r_{tabel} , dan didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* di atas nilai 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel terbukti reliabel.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap transparansi (Y_1), hasil pengujian normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* persamaan regresi sebesar 0,950 atau persamaan tersebut memiliki signifikansi sebesar 0,328. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa asumsi residual normalitas terpenuhi. Uji asumsi klasik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y_2), pada pengujian ini menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* persamaan regresi sebesar 0,550 atau persamaan tersebut memiliki signifikansi sebesar 0,923. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa asumsi residual normalitas terpenuhi.

Pengujian multikolinieritas variabel transparansi (Y_1) secara statistik menunjukkan nilai *tolerance* semua variabel lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam regresi

tersebut, sehingga variabel bebas yang diukur, bebas asumsi multikolinearitas. Uji multikolinearitas pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y_2) menunjukkan nilai *tolerance* semua variabel lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam regresi tersebut, sehingga variabel bebas yang diukur, bebas asumsi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas pada variabel transparansi (Y_1) berdasarkan pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel penyajian laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) terhadap absolut residual adalah lebih dari 0,05, Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi bebas dari kasus heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y_2) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel penyajian laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) terhadap absolut residual adalah lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi bebas dari kasus heterokedastisitas.

Pengujian autokorelasi pada variabel transparansi (Y_1), nilai Durbin Watson sebesar 1.953. Hal ini disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam persamaan regresi penelitian ini. Sedangkan pengujian autokorelasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y_2) diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1.697. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam persamaan regresi.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar 1.020 dan signifikansi 0.310 lebih besar dari 0.05. maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

Hasil yang tidak signifikan dikarenakan ketidaktepatan waktu penyajian laporan keuangan. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan melihat laman kabupaten Lamongan yaitu di www.lamongan.go.id. Laman kabupaten Lamongan tersebut belum menyajikan laporan keuangan pada tahun anggaran yang berakhir pada tahun 2013. Hal yang serupa juga dapat dilihat pada laporan Direktorat Jenderal Keuangan,

bahwa kabupaten Lamongan belum menyajikan laporan keuangan secara transparan yang meliputi laporan ringkasan RKA-SKPD, ringkasan RKA-PPKD, Raperda tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit dan opini atas laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (keuda.kemendagri.go.id/transparansikeuangan/nasional16).

Hasil ini juga tidak sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan setidaknya mencakup laporan APBD dan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, laporan keuangan perusahaan daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal daerah.

Ketepatan waktu serta kelengkapan informasi mengenai penyajian laporan keuangan sangat penting bagi pemerintah daerah. Hal tersebut diharapkan agar mampu menyajikan laporan keuangan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan terhadap peraturan undang-undang, agar penyajian laporan keuangan dapat menghasilkan *output* sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dapat memenuhi aspek transparansi serta tata kelola pemerintah yang baik.

Pemerintah diharapkan mampu mewujudkan peran transparansi kepada publik secara efektif dan tepat waktu. Apabila peran transparansi dapat dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta suatu pemerintahan yang memiliki *good governance*, dimana pemerintah akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah dengan baik dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hasil penelitian yang menunjukkan tidak signifikan antara penyajian laporan keuangan terhadap transparansi tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan

terhadap transparansi. Nilai koefisien sebesar 4.146 dengan signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan hubungan yang positif antara aksesibilitas laporan keuangan dengan transparansi. Artinya jika aksesibilitas pemerintah daerah sudah memadai maka semakin tinggi pula tingkat transparansi. Selain menyajikan laporan keuangan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah kemudahan akses bagi masyarakat atau pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi.

Hasil pengujian hipotesis kedua mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mulyana (2006) dan Aliyah dan Nahar (2012) yang menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas yang memadai dapat dibuktikan dengan adanya laman kabupaten Lamongan yaitu www.lamongan.go.id. Selain itu, juga dapat ditunjukkan dengan penerimaan penghargaan kepada kabupaten Lamongan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atas prestasinya menempati peringkat terbaik dalam Peningkatan *e-Government* Indonesia. Pemanfaatan dan pendayagunaan *e-Government* ini sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dengan harapan agar penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas ditekankan pada pendekatan pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan layanan publik adapun beberapa pelayanan *e-government* yang telah diterapkan. Pelayanan *e-government* antara lain adalah aplikasi manajemen keuangan berupa Sistem Aplikasi Keuangan Akuntansi (SAKTI), aktifitas dalam manajemen administrasi berupa surat menyurat, perizinan, dan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Elektronik (www.antarajatim.com).

c. Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap transparansi dengan nilai koefisien sebesar 0.0607 dan signifikansi sebesar 0.545 lebih besar dari 0,05. Artinya, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan penilaian resiko atas suatu kegiatan pemerintah daerah. Jika suatu metode penilai atau pengukuran risiko serta sistem informasi manajemen resiko tidak dilaksanakan secara efektif

maka pemerintah tidak dapat mengevaluasi risiko dalam suatu kegiatan yang telah dilaksanakan maupun kegiatan yang tidak terlaksana. Jika suatu SKPD tidak memberikan penilaian risiko serta sistem manajemen risiko tidak dilaksanakan dengan baik atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas maka akan rentan terhadap tindak pidana korupsi maupun kecurangan lainnya.

Hasil yang tidak signifikan juga dapat dipengaruhi oleh adanya lingkungan organisasi pemerintah maupun luar organisasi pemerintahan seperti adanya perubahan atau tidak terlaksananya suatu kegiatan yang mengakibatkan ketidakpastian dalam melaksanakan kegiatan operasional dan dapat mempengaruhi tingkat transparansi pada suatu kegiatan terhadap publik. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap strategi pemerintah yang menyebabkan pengambilan keputusan semakin terdesentralisasi. Sebagai dampak dari kelemahan pengendalian intern, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program atau kegiatan juga belum berjalan optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa temuan tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten Lamongan. Sehingga dari sudut pandang sistem pengendalian, dapat dikatakan sistem pengendalian tidak terlaksana secara menyeluruh dan secara integral. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem pengendalian yang kuat untuk pengelolaan kegiatan dan risiko serta pemilihan metode tata kelola atas perencanaan kegiatan yang tepat, sehingga mampu dikendalikan dan diperoleh suatu hasil kegiatan yang diinginkan. Selain itu dengan adanya suatu pengendalian yang kuat maka akan tercipta suatu wujud transparansi yang efektif dan efisien karena sistem pengendalian intern juga diperlukan untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan kepada publik.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) yang meneliti tentang pengaruh SPIP terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh secara positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah kota Cimahi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang kuat dan searah, dimana peningkatan pengendalian internal yang terjadi akan seiring dengan peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah Kota Cimahi.

d. Pengujian Hipotesis 4

Pengujian hipotesis keempat mengenai penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelo-

laan keuangan daerah memperoleh hasil yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -886 dan signifikansi sebesar 0,378, nilai ini lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Sande (2013) yang menyatakan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu bukti penyebab penyajian laporan keuangan yang tidak akuntabel adalah laporan keuangan pemerintah kabupaten Lamongan mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. Beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan mendapat opini WDP adalah adanya bukti yang disajikan kurang cukup, adanya pembatasan ruang lingkup, dan terdapat penyimpangan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum.

e. Pengujian Hipotesis 5

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Nilai koefisien sebesar 1,940 dan nilai signifikansi sebesar 0.055. Hasil *output* mengindikasikan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Hasil yang tidak signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena diduga pemerintah daerah hanya mempublikasikan informasi terkait laporan keuangan maupun kinerja pemerintah hanya melalui internet saja, sedangkan pada media lainya kurang efektif. Padahal perlu dipertimbangkan juga kondisi masyarakat yang belum memahami teknologi informasi. Tidak semua masyarakat mengetahui dan memahami internet, karena kebanyakan akses internet lebih aktif dipergunakan untuk mempublikasikan laporan keuangan oleh pemerintah daerah daripada media nirmassa seperti koran, majalah, surat kabar dan televisi.

Hasil pengujian terhadap hipotesis kelima tidak mendukung pernyataan Mustofa (2012). Penelitian Mustofa (2012) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah wajib memiliki media sebagai informasi keuangan daerah yang dapat bermanfaat bagi pi-

hak eksternal dan pihak internal yang membutuhkan. Seperti yang diungkapkan oleh Shende dan Bennet, (2004) bahwa dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan laman serta forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

f. Pengujian Hipotesis 6

Hasil pengujian terhadap hipotesis keenam menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Nilai koefisien sebesar 2.620 dan nilai signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis keenam diterima.

Hasil yang signifikan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah dapat dibuktikan dengan adanya penerapan sistem *Term of Reference* (TOR) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. TOR dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman SPIP sekaligus menerapkan penyelenggaraannya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sesuai dengan kondisi dan kompleksitas permasalahan yang ada. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman atas berlakunya PP Nomor 60 tahun 2008, sehingga pengendalian dapat terlaksana secara menyeluruh dan secara integral. Selain itu hal ini juga dapat diperkuat dengan adanya pengungkapan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten Lamongan. Pengungkapan inilah yang menandakan bahwa sistem pengendalian internal serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lamongan cukup dinilai baik dan sudah berjalan efektif. Penerapan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dan secara integral, diharapkan agar pemerintah mampu mengelola kekayaan daerah dengan sebaik mungkin agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat serta dapat meminimalkan dan memberantas tindak korupsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan secara menyeluruh dan integral akan mampu menciptakan suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zalni (2013). Penelitian Zalni (2013) menyatakan bahwa semakin baik penerapan SPIP, maka semakin terwujud pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

5. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: penyajian laporan keuangan dan SPIP tidak berpengaruh terhadap transparansi, namun aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya berfokus pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pihak internal pemerintah yang berfungsi sebagai pengelola keuangan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi di pihak internal yaitu pengelola keuangan pemerintah dan pihak eksternal yaitu pengguna laporan keuangan.

Daftar Rujukan

- Aidil. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi). *Tesis*. Universitas Sumatra Utara Medan.
- Aliyah, S. dan A. Nahar. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, hlm. 137-150. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hartadi, Bambang. (1999). *Sistem Pengendalian Intern*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, M., F. Sulistiyowati, dan H. A. Purwanugraha. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. ISSN 2252-6765. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Dae-

- rah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 65-78. Universitas Gajah Mada.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)*.
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sari, D. (2012). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.
- Shende, S. dan T. Bennet. (2004). *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UNDESA.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Zalni, F. (2013). Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Bidang Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- www.lamongan.go.id, Diakses pada tanggal 10 November 2013.
- www.antarajatim.com, Diakses pada tanggal 18 Juni 2014.
- keuda.kemendagri.go.id/transparansikeuangan/nasiona116, Diakses 16 juni 2014.